

## STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

Dadang S. Anshori

### A. DASAR PEMIKIRAN DAN POTENSI DASAR

1. Jawa Barat tidak bisa dipisahkan dari tatanan nasional dan global. Di samping secara geo grafis menjadi penyangga ibukota, Jawa Barat memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa. Konsekuensinya adalah persoalan bangsa menjadi persoalan Jawa Barat dan persoalan Jawa Barat akan berkorelasi positif terhadap persoalan bangsa ini. Krisis bangsa secara langsung telah turut mengubah kondisi pembangunan Jawa Barat yang jumlah penduduknya mencapai 42 juta jiwa (20% dari penduduk nasional). Oleh karena itu pembangunan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ril masyarakat Jawa Barat dan persoalan nasional bangsa ini. Misalnya rendahnya kualitas SDM Indonesia juga berkorelasi langsung terhadap Jawa Barat. Tabel berikut menjelaskan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

#### Peringkat Kualitas SDM dan Daya Saing Indonesia

Negara	SDM (UNDP 2000)	Daya Saing (WEY 2000)
Australia	4	12
Jepang	9	-
Singapura	24	2
Brunei Daruslam	32	-
Malaysia	61	27
Thailand	76	34
Filipina	77	32
Vietnam	108	-
Indonesia	109	46
Myanmar	125	-

Sumber: HDR 2000

2. Sejak 1990 UNDP (*United Nations Development Programe*) membuat standar internasional kemajuan sebuah bangsa dengan mengukur melalui

*Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semula tingkat kemajuan sebuah bangsa hanya didasarkan pada GDP (*Gross Domestic Product*) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pembangunan Jawa Barat harus berlandaskan pada ketercapaian nilai angka HDI. HDI (*human development index*) sendiri diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembangunan manusia tingkat tinggi (*high human development*), kelas sedang (*medium human development*), dan kelas rendah (*low human development*). Lima besar HDI diduduki oleh Kanada, Norwegia, Amerika Serikat, Australia dan Iceland (Islandia). *Human development index* (HDI) dihitung berdasarkan tiga komponen penting, yakni indeks harapan hidup (*longevity*), indeks pendidikan (*knowledgeable*) yang terdiri atas lama pendidikan dan melek huruf, serta menikmati tingkat hidup yang layak yang ditandai dengan daya beli (*decent standard of living*) atau konsumsi perkapita. Standar yang digunakan untuk ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

#### Standar Human Development Index

Indikator	Minimum	Maksimum
Harapan hidup	25 tahun	85 tahun
Tingkat melek huruf	0%	100%
Lama sekolah	0 tahun	15 tahun
Konsumsi perkapita	Rp 300.000,-	Rp. 732.720,-

Sumber: UNDP, 1990

Dengan berdasarkan pada standar HDI di atas Jawa Barat termasuk ke dalam kelas medium. Pada tahun 1994-1998 angka lama sekolah di Jawa Barat adalah 6,39 tahun. Dengan demikian rata-rata penduduk Jawa Barat baru mengenyam sekolah dasar. Angka lama pendidikan terbesar adalah Kota Bandung, yakni 9,61 tahun sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Indramayu sebesar 3,8 tahun. Angka melek huruf di Jawa Barat sebesar 91,41%, yang berarti di Jawa Barat masih terdapat penduduk yang buta huruf sebesar 8,59%. Angka melek huruf tertinggi terdapat di Kota Sukabumi sebesar 98,68% sedangkan angka melek huruf terendah adalah Kabupaten

Sukabumi, yakni sebesar 69,02% yang berarti kabupaten tersebut masih memiliki sebanyak 30,98% masyarakat buta huruf.

Dengan penghitungan kuantitatif berdasarkan standar global IPM, maka diperoleh angka indeks pembangunan manusia atau kualitas sumber daya manusia Jawa Barat sejak 1994-1998 sebesar 0,649. Angka ini, secara nasional, merupakan urutan ke-15 dari 27 propinsi. Nilai IPM tertinggi dimiliki Kota Bogor sebesar 0,76 dan terendah adalah Kabupaten Indramayu sebesar 0,563. Beberapa daerah memiliki IPM di atas rata-rata Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang dan Kabupaten Ciamis. Data lengkap mengenai IPM daerah di Jawa Barat disajikan dalam tabel berikut:

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Jawa Barat  
Tahun 1994-1998**

No	Kabupaten	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-Rata	Rata-Rata Pert (%)
1	Pandeglang	0,581	0,606	0,636	0,654	0,548	0,605	-1,044
2	Lebak	0,555	0,578	0,618	0,618	0,633	0,553	0,587
3	Bogor	0,612	0,633	0,671	0,691	0,632	0,648	0,982
4	Sukabumi	0,572	0,596	0,653	0,661	0,645	0,626	3,149
5	Cianjur	0,600	0,627	0,658	0,685	0,666	0,647	2,685
6	Bandung	0,627	0,661	0,690	0,734	0,642	0,671	0,906
7	Garut	0,596	0,622	0,649	0,676	0,608	0,630	0,710
8	Tasikmalaya	0,600	0,624	0,662	0,693	0,646	0,645	1,973
9	Ciamis	0,613	0,643	0,670	0,702	0,659	0,657	1,950
10	Kuningan	0,627	0,648	0,681	0,709	0,674	0,668	1,903
11	Cirebon	0,600	0,625	0,651	0,669	0,576	0,624	-0,674
12	Majalengka	0,587	0,612	0,655	0,685	0,629	0,634	1,940
13	Sumedang	0,643	0,667	0,700	0,714	0,659	0,676	0,776
14	Indramayu	0,512	0,543	0,586	0,604	0,571	0,563	2,896
15	Subang	0,592	0,617	0,658	0,681	0,644	0,639	2,226
16	Purwakarta	0,595	0,628	0,655	0,669	0,632	0,636	1,641
17	Karawang	0,543	0,575	0,620	0,653	0,573	0,593	1,697
18	Bekasi	0,669	0,663	0,679	0,712	0,600	0,665	-2,328
19	Tangerang	0,601	0,618	0,648	0,654	0,614	0,627	0,655
20	Serang	0,547	0,574	0,619	0,660	0,585	0,597	2,022

21	K. Bogor	0,880	0,720	0,757	0,777	0,665	0,760	-6,199
22	K. Sukabumi	0,847	0,717	0,745	0,764	0,663	0,747	-5,540
23	K. Bandung	0,695	0,730	0,758	0,771	0,659	0,723	-0,987
24	K. Cirebon	0,676	0,729	0,762	0,805	0,762	0,747	3,162
25	K. Tangerang	0,609	0,648	0,684	0,726	0,631	0,660	1,259
26	K. Bekasi	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jawa Barat</b>	<b>0,619</b>	<b>0,639</b>	<b>0,671</b>	<b>0,697</b>	<b>0,617</b>	<b>0,649</b>	<b>0,154</b>

Sumber: Data BPS (diolah kembali)

Dari data di atas, terlihat bahwa berbagai daerah di Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan yang berbeda-beda. Di antara beberapa wilayah mengalami rata-rata pertumbuhan yang minus, seperti Pandeglang (-1,044%), Cirebon (-0,674%), Bekasi (-2,328%), K. Bogor (-6,199%), K. Sukabumi (-5,540%), dan K. Bandung (-0,987%). Di antara wilayah mengalami rata-rata pertumbuhan antara 0%-1%, yakni Lebak (0,587%), Bogor (0,982%), Bandung (0,906%), Garut (0,710%), Tasikmalaya (1,973%), Ciamis (1,950%), Kuningan (1,903%), Majalengka (1,940%), Sumedang (0,776%), Purwakarta (1,641%), Karawang (1,697%), Tangerang (0,655%), dan K. Tangerang (1,259%). Demikian pula ada wilayah yang mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi (2%-3%), yakni Sukabumi (3,149%), Cianjur (2,685%), Indramayu (2,896%), Subang (2,226%), Serang (2,022%), dan K. Cirebon (3,162%).

Di samping itu, apabila dilihat dari perbandingan perkapita masing-masing daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat, ditemukan adanya kecenderungan di beberapa kabupaten dan kota bahwa tingkat pendapatan perkapita tidak mendukung tingginya IPM. Hal ini berarti masyarakat di kabupaten atau kota tersebut belum mampu mengkonversikan pendapatannya terhadap bentuk-bentuk kesejahteraan (pendidikan, daya beli, dan kesehatan). Daerah-daerah yang keadaannya seperti ini adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Serang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Garut, Subang, Indramayu, Pandeglang, dan Lebak. Sementara daerah yang sudah mampu mengkonversikan pendapatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Kota Sukabumi, Kota

Bogor, Kabupaten Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Cirebon, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.

3. Berkembangnya paradigma desentralisasi sebagai bentuk perubahan dari sentralisasi dan dekonsentrasi yang selama 32 tahun pembangunan pendidikan kurang mampu memberikan hasil yang memadai. Desentralisasi seiring dengan berlakunya PP. 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang diperjelas kembali dalam PP. 25/2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Otonom Propinsi. Menurut UU No. 25/2000 pembagian kewenangan tersebut diatur sebagai berikut:

**Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Otonom Propinsi  
Berdasarkan PP No. 25/2000**

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Otonom Propinsi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.</li> <li>2. Penetapan standar materi pembelajaran pokok.</li> <li>3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.</li> <li>4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.</li> <li>6. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.</li> <li>7. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan tentang siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.</li> <li>2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.</li> <li>3. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.</li> <li>4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.</li> <li>5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.</li> </ol>

Di luar kewenangan pemerintah pusat dan propinsi di atas, maka pendidikan dilakukan oleh pemerintah otonom kabupaten dan kota. Kewenangan ini mencakup pengambilan keputusan, pemrograman, implementasi, monitoring program, dan pengadaan sarana-prasarana pendidikan (Ace Suryadi, 2000).

4. Dengan mengacu pada Propenas Depdiknas 2000-2004 (Wahyudi R, 2000) Beberapa persoalan mendasar pendidikan Jawa Barat ke depan dideskripsikan dalam beberapa hal berikut:

A. Perluasan dan pemerataan pendidikan. Sejak tahun 1984 konsep pemerataan pendidikan ini dijawantahkan melalui program Wajar 6 tahun (tamat SD) dan sejak 1994 program ini disempurnakan menjadi program Dikdas 9 tahun (tamat SLTP). Di Jawa Barat, dengan melihat angka partisipasi pendidikan masyarakat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun ini masih memerlukan sekitar 28,55% untuk mencapai 85%. Angka ini harus ditempuh dalam limit waktu 3 tahun mendatang (2003). Sementara dari data yang ada ditemukan bahwa kenaikan partisipasi murni pendidikan SLTP setiap tahun hanya berkisar antara 2%-3%. Penuntasan angka partisipasi murni ini secara normal tanpa adanya intervensi dari birokrasi pendidikan sangat sulit dicapai. Oleh karena itu diperlukan sebuah program dan kebijakan terpadu dalam waktu yang relatif singkat untuk menaikkan angka partisipasi murni pendidikan SLTP. Angka-angka di atas menjadi dasar rasionalisasi program pemerataan pendidikan. Dengan diketahui data IPM dan kelemahan di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat, maka penguatan kebijakan pemerataan harus lebih mendapatkan prioritas dibandingkan persoalan lainnya.

B. Menyiapkan produk unggulan pendidikan. Jawa Barat memiliki banyak potensi tersebut. Di Jawa Barat tidak kurang dari 10 SMU Unggulan Swasta dan Negeri, seperti SMU (Plus) Muthahhari, SMUT Krida Nusantara, SMU Al Ma'soem, SMU Darul Hikam, SMU Insan Cendikia,

SMU Madania, SMU Al Azhar, SMU Dwi Warna, SMU Pemda Jabar, SMU PGII, SMUN 3, SMUN 5 dll. Di samping itu Jawa Barat memiliki perguruan tinggi unggulan (ITB, UI, IPB, UNPAD, UPI, IAIN, UNPAR). Potensi ini tentu bukan dimaksudkan untuk segelintir kelompok masyarakat saja, melainkan bersifat universal untuk semua orang. Maka berdasarkan PP No. 25/2000 pemerintah otonom propinsi dapat menentukan kebijakan agar masyarakat dari kelompok termarjinal dapat mengenyam pendidikan (*education for all*).

- C. Pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi masyarakat. Pemerintah tak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan secara sendirian. Oleh karena itu peran masyarakat baik yang dilembagakan atau secara individual sangat diperlukan. Saat ini mulai tumbuh berkembang institusi-institusi masyarakat yang mengembangkan secara langsung pendidikan. Untuk itu, pemerintah secara terbuka ikut mengarahkan dan memberikan kemudian fasilitas birokrasi bagi partisipasi masyarakat tersebut. Intervensi pemerintah daerah terhadap institusi masyarakat tersebut bisa dalam bentuk mendorong agar institusi tersebut memiliki kualitas yang sama bahkan melebihi sekolah-sekolah negeri.
- D. Pengakuan hak-hak masyarakat termasuk hak berpendidikan. Mengakui pendidikan sebagai hak berarti memperbanyak kesempatan untuk mengakses pendidikan. Wajar Dikdas 9 tahun dalam konteks pengakuan hak menghendaki adanya kebijakan yang meringankan orang tua agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan hingga SLTP. Namun kenyataan menunjukkan lain, setiap pergantian tahun ajaran, orang tua senantiasa dihadapkan pada persoalan keuangan, bahkan banyak orang tua tak mampu memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah anaknya, karena terlalu besarnya biaya SLTP. Tampaknya perlu dikaji sebuah sistem yang memungkinkan para orang tua mengeluarkan biaya pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuannya.

- E. Kerjasama dengan pihak industri. Keterlibatan pihak industri sangat dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan. Kerjasama dengan pihak industri merupakan langkah menuju dunia nyata (kerja) yang jauh dari kehidupan sekolah. Kerjasama bisa dilakukan mulai dari orang tua asuh hingga proses pemagangan dalam pendidikan. Model-model semacam ini dikembangkan di Jerman, Korea dll. Dengan demikian, peserta didik benar-benar menguasai keterampilan yang akan dipergunakan setelah dia lulus dari jenjang pendidikan tertentu.
- F. Demokratisasi pembelajaran. Perlu dikembangkan paradigma baru dalam pembelajaran. Posisi guru bukan segala-galanya. Yang penting diberikan adalah bagaimana pembelajar mengetahui cara belajar (*how to learn*) sehingga mereka bisa belajar sepanjang hidupnya. Dalam demokratisasi pembelajaran perlu dilakukan terobosan-terobosan yang menghargai sepenuhnya kemampuan siswa. Di perguruan tinggi misalnya perlu dikaji pelaksanaan sistem SKS murni, maksudnya mahasiswa sejak awal memiliki sejumlah matakuliah yang hendak dipelajarinya. Demokratisasi pembelajaran berkait erat dengan mentalitas guru dan siswa. Di satu sisi diperlukan sikap guru yang menjadikan siswa sebagai pembelajar yang sejajar dan memungkinkan untuk berkembang lebih dari sekedar gurunya, namun dipihak lain, siswa perlu mengembangkan sikap kritis, berani berargumentasi, menggunakan bahasa dengan logika yang baik, berarti berbeda pendapat dengan gurunya, dan berani menetapkan pilihan-pilihan terhadap nilai yang ditransformasi gurunya.

## **B. AGENDA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

1. Pembangunan pendidikan harus diarahkan selaras dengan orientasi pembangunan nasional agar pendidikan berkontribusi secara nyata. Andaikata



Jawa Barat menghendaki poros pembangunan agrobisnis sebagai sentral, maka sudah saatnya dipikirkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai agrobisnis. Hal ini tidak berarti menghilangkan hakikat pendidikan sebagai proses perubahan dalam masyarakat. Namun perubahan dimaksud adakalanya harus secara jelas indikatornya. Membentuk sebuah masyarakat agraris-modernis (agrobisnis) memerlukan pendidikan sebagai wahana perubahan sumber daya manusia. Apabila lembaga pendidikan sanggup melakukan semua itu, baru akan terasa kehadiran pendidikan dalam masyarakat.

Otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi pendidikan merupakan bagian dari penghargaan terhadap kreativitas daerah (lokal) untuk mengembangkan diri tanpa harus dibebani target-target pusat, yang kerap kali “membunuh” kreativitas daerah. Namun peluang ini bisa bermanfaat apabila sumber daya manusia daerah memiliki kemampuan untuk menangkap peluang ini secara baik. Diperlukan pengubahan pola pikir yang selama ini sudah mengakar dan mentradisi. Termasuk dalam memandang sosok pendidikan secara utuh. Birokrasi pendidikan hendaknya tidak menjadi lembaga yang hanya mengerjakan proyek-proyek yang dirancang secara rutin pertahun, melainkan menjadi manajer dan sanggup mengendalikan arah kebijakan pendidikan agar selaras dengan tujuan pembangunan di daerah. Oleh karena itu kebijakan pendidikan di daerah hendaknya diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Andaikata pemerintah Jawa Barat mengarahkan pembangunan pada bidang agobisnis, maka pembangunan pendidikan harus diarahkan pada terciptanya sumber daya manusia yang menguasai bidang agrobisnis. Maka program yang dikembangkan adalah membenahi kembali kurikulum dan manajemen SPMA yang selama ini kurang diperhatikan atau menitipkan program politeknik agrobisnis kepada perguruan tinggi agar dicetak orang-orang yang siap terjun di bidang tersebut. Dengan demikian, pendidikan bersinergi keberadaan dengan pembangunan daerah.

2. Dalam rangka otonomi daerah, pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Maka sangat mungkin daerah menambah atau mengurangi standar kurikulum nasional sesuai dengan kebutuhan daerah. Apa yang hendak dilestarikan dan ditransformasikan kepada generasi muda Jawa Barat hendaknya dimasukkan ke dalam kurikulum lokal Jawa Barat, bukan hanya bahasa Sunda yang selama ini Ada. Sebagai terobosan baru, mungkin saja Jawa Barat menambah kurikulum dengan mata pelajaran budi pekerti, kesenian daerah, bahasa Sunda untuk daerah Botabek yang berbahasa ibu bahasa Indonesia, sejarah Jawa Barat dll. yang kontekstual bagi pembangunan Jawa Barat. Maka sebelum Mei 2001, saat diberlakukannya otonomi daerah, birokrasi pendidikan, pakar pendidikan, dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan harus bekerja keras menyusun kurikulum pendidikan bermuatan lokal Jawa Barat yang benar-benar merupakan cermin aspirasi dan prospek masa depan pendidikan Jawa Barat. Apabila ini tidak dilakukan maka, pendidikan di Jawa Barat akan tertinggal jauh.
3. Seluruh program pendidikan Jawa Barat hendaknya memiliki target-target yang jelas baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hendaknya dihindarkan proyek-proyek rutin yang tidak jelas sasaran dan hasilnya. Dengan melihat kenyataan IPM Jawa Barat di atas, maka seluruh program pendidikan hendaknya selaras dengan pembentukan sumber daya manusia sehingga bisa mengangkat angka IPM. Demikian pula, melihat partisipasi murni SLTP, maka dalam 4 tahun mendatang seluruh energi pendidikan hendaknya diarahkan tuntasnya program wajar 9 tahun. Hanya dengan ini, kita akan mampu melihat secara lurus program pendidikan dalam korelasinya dengan pembangunan nasional. Pendidikan yang memadai akan mengantarkan masyarakat pada tingkat partisipasi pembangunan yang baik.
4. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertinggal. Tiap

daerah di wilayah Jawa Barat hendaknya mengidentifikasi kembali sumber daya manusianya sehingga bisa menentukan kebijakan manakah yang sesuai dengan kondisi sumber daya manusia. Keberadaan PT di Jawa Barat hendaknya mampu membantu pemuda-pemuda di daerah yang secara ekonomis berkekurangan, namun berhasrat besar untuk membangun daerahnya. Mungkin juga dibuat semacam “anak asuh” yang dilakukan langsung oleh PT kepada pemuda-pemuda dari daerah-daerah di Jawa Barat. Hal ini tentu tidak berarti perguruan tinggi tersebut mengabaikan kualitas “anak asuhnya”. Mungkin juga PT bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/kota untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerahnya. Pola-pola binaan dan kerjasama ini akan mempercepat Kabupaten/Kota menyiapkan sumber daya manusia di daerahnya. Kita harus sadar, bahwa tak mungkin kita bisa membangun dan kompetisi di era otonomi dan globalisasi tanpa kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas.

5. Otonomi daerah menghendaki adanya kemandirian sekolah dalam mengelola sistem pendidikannya tanpa intervensi yang berlebihan dari pihak birokrasi. Kemandirian sekolah ini diperlukan agar sekolah memiliki daya saing yang kompetitif. Pemerintah pusat dan daerah hanya cukup menetapkan standardisasi (semacam akreditasi) yang harus dicapai oleh sebuah sekolah. Dengan demikian sekolah akan terus memacu diri untuk meraih standard terbaik. Pemerintah juga bisa masuk ke lembaga sejenis “dewan sekolah” yang tugasnya melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Lembaga ini terdiri atas, kepala sekolah, guru, perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua, dan pakar pendidikan. Melalui “dewan sekolah” inilah segala persoalan pendidikan di sekolah tersebut dipecahkan bersama-sama.
6. Mengingat keterbatasan sekolah formal dan keterbatasan usia masuk sekolah, maka perlu lebih ditingkatkan peran pendidikan luar sekolah dalam rangka mengentaskan 8,59% jumlah buta huruf di Jawa Barat. Demikian pula

kehadiran program paket belajar dan SLTP Terbuka, hendaknya dijadikan fokus untuk memberantasan buta huruf dan meningkatkan angka lama sekolah yang tidak bisa diselenggarakan melalui jalur sekolah formal.

7. Besarnya biaya pendidikan hendaknya tidak didasarkan pada proyek-proyek rutin yang kontribusinya kurang bagi peningkatan pendidikan. Besarnya dana pendidikan harus didasarkan sebuah kajian dengan prioritas-prioritas program yang benar-benar mampu mendorong peningkatan orientasi pendidikan. Sebenarnya berapa besarnya dana pendidikan dan apa dasarnya jumlah tersebut belum kita temukan. Ajuan agar dana pendidikan 25% dari APBN/APBD baru berupa hipotesis, sementara belum ditemukan rasionalisasi dari angka-angka tersebut. Maka perlu dilakukan kajian secara khusus berapa angka prosesntase pendidikan di Jawa Barat yang ideal dan proporsional dengan pembangunan lainnya.
8. Pengembangan sistem informasi pendidikan melalui penguasaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan harus segera dimulai di Jawa Barat. Teknologi informasi akan memungkinkan berbagai pihak mengetahui perkembangan pendidikan Jawa Barat. Sangat mungkin di masa depan Jawa Barat menjadi model pengembangan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Saat ini akses internet menjadi hak yang tidak bisa abaikan. Internet bukan hanya menjadi fasilitas belajar namun memungkinkan sebuah sekolah mengadakan komunikasi dengan pihak lain dalam rangka mengetahui akuntabilitas lembaga pendidikan lainnya. Kualitas dan akuntabilitas sebuah lembaga pendidikan dengan transparan harus diketahui oleh publik, oleh karena itu, melalui internet hal tersebut akan bisa dilakukan. Internet juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat luas untuk menentukan standardisasi sebuah lembaga pendidikan.

### **C. PREDIKSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN IPM**

Berikut ini disajikan prediksi normal indeks pendidikan jika dibandingkan dengan anggaran bidang pendidikan. Angka ini belum termasuk apabila terjadi kemungkinan inflasi. Indeks pendidikan diperoleh dari rata-rata lama sekolah dengan angka melek huruf. Dari data tersebut kita akan melihat bahwa ada daerah di Jawa Barat yang memiliki anggaran pendidikan cukup tinggi tetapi tidak efektif terhadap pertumbuhan indeks pendidikan. Hal ini berarti program-program yang dijalankan tidak sinergis dengan poros pembangunan IPM. Demikian pula, fakta lain menunjukkan bahwa efisiensi program dengan pemanfaatan dana yang minimal, bisa berkontribusi positif bagi peningkatan indeks pendidikan. Persoalan mendatang adalah melakukan efisiensi anggaran untuk program yang benar-benar memiliki kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dari data berikut juga, kita akan melihat prediksi indeks pendidikan dengan jumlah anggaran yang diterapkan oleh masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Untuk meningkatkan lebih tinggi lagi indeks pendidikan tentu diperlukan intervensi yang cukup besar berupa anggaran dan efisiensi program benar-benar bisa berkontribusi terhadap indeks pendidikan. Prediksi menunjukkan, bahwa ada kemungkinan beberapa wilayah di Jawa Barat akan mengalami penurunan anggaran atau penurunan indeks. Hal tersebut sangat bergantung pada dua hal di atas.

Memiliki prediksi yang tepat atau mendekati akan memungkinkan pihak pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan kuratif terhadap problema pendidikan. Data ini pun dapat memungkinkan birokrasi pendidikan memilih program yang tepat untuk pembangunan secara periodik. Demikian pula, akan sangat mudah birokrasi pendidikan mengevaluasi apakah program-program yang dilakukan tersebut berhasil secara baik atau tidak sehingga dengan mudah dapat diambil keputusan untuk memperbaikinya. Berikut ini data prediksi tersebut.

**Prediksi Perkembangan Indeks Pembangunan dan Anggaran Pembangunan Pendidikan (dalam juta rupiah)**

Tahun	1 Pandeglang IP	Anggaran	2 Lebak IP	Anggaran	3 Bogor IP	Anggaran	4 Sukabumi IP	Anggaran	5 Cianjur IP	Anggaran
1994	0,53	4.124	0,51	2.860	0,60	7.229	0,55	4.186	0,58	4.492
1995	0,53	2.870	0,50	2.463	0,60	7.076	0,54	3.993	0,58	4.030
1996	0,54	3.351	0,52	2.304	0,61	7.532	0,56	4.599	0,58	4.091
1997	0,54	4.705	0,53	3.971	0,61	7.313	0,56	4.725	0,59	4.425
1998	0,56	2.740	0,54	1.773	0,61	4.005	0,57	3.014	0,59	4.700
1999	0,57	4.162	0,54	3.250	0,62	7.053	0,57	4.350	0,60	4.514
2000	0,57	4.212	0,55	3.292	0,62	7.100	0,58	4.386	0,60	4.541
2001	0,58	4.263	0,56	3.334	0,63	7.148	0,58	4.422	0,60	4.568
2002	0,59	4.314	0,56	3.377	0,63	7.197	0,59	4.459	0,61	4.596
2003	0,59	4.367	0,57	3.421	0,64	7.245	0,59	4.496	0,61	4.624
2004	0,60	4.419	0,58	3.465	0,64	7.294	0,60	4.534	0,61	4.651
2005	0,61	4.473	0,59	3.509	0,64	7.343	0,60	4.571	0,62	4.679

Tahun	6 Bandung IP	Anggaran	7 Garut IP	Anggaran	8 Tasikmalaya IP	Anggaran	9 Ciamis IP	Anggaran	10 Kuningan IP	Anggaran
1994	0,61	8.123	0,56	4.181	0,59	-	0,59	3.662	0,55	1.634
1995	0,61	8.429	0,56	4.132	0,58	1.715	0,59	3.207	0,55	612
1996	0,61	8.286	0,57	3.797	0,59	4.268	0,59	3.510	0,56	1.574
1997	0,62	5.510	0,58	4.332	0,59	3.507	0,60	3.442	0,57	2.309
1998	0,62	2.329	0,58	1.971	0,59	1.559	0,59	2.067	0,57	2.440
1999	0,62	7.555	0,58	4.112	0,59	3.552	0,59	3.346	0,58	2.241
2000	0,62	7.576	0,59	4.153	0,59	3.560	0,60	3.356	0,58	2.262
2001	0,62	7.596	0,60	4.195	0,60	3.569	0,60	3.365	0,59	2.840
2002	0,63	7.617	0,60	4.237	0,60	3.578	0,60	3.374	0,60	2.305
2003	0,63	7.638	0,61	4.280	0,60	3.587	0,60	3.383	0,60	2.327
2004	0,63	7.660	0,61	4.323	0,60	3.596	0,60	3.393	0,61	2.349
2005	0,63	7.681	0,62	4.367	0,60	3.604	0,60	4.402	0,61	2.372

Tahun	11 Cirebon IP	Anggaran	12 Majalengka IP	Anggaran	13 Sumedang IP	Anggaran	14 Indramayu IP	Anggaran	15 Subang IP	Anggaran
1994	0,52	3.374	0,55	2.522	0,59	2.446	0,39	3.667	0,48	4.109
1995	0,53	3.003	0,55	2.406	0,59	1.757	0,33	2.987	0,48	3.600
1996	0,53	2.884	0,55	2.584	0,60	1.855	0,41	3.313	0,50	3.997
1997	0,54	3.220	0,56	2.803	0,59	2.095	0,40	3.373	0,51	3.319
1998	0,55	3.598	0,55	2.444	0,59	2.216	0,40	2.088	0,51	1.751
1999	0,56	3.439	0,55	2.587	0,60	2.230	0,41	3.317	0,51	3.742
2000	0,57	3.482	0,55	2.592	0,60	2.237	0,41	3.353	0,52	3.789
2001	0,57	3.526	0,56	2.597	0,60	2.245	0,42	3.390	0,52	3.837
2002	0,58	3.570	0,56	2.602	0,60	2.252	0,42	3.428	0,53	3.885
2003	0,59	3.615	0,56	2.607	0,60	2.259	0,43	3.466	0,54	3.934
2004	0,59	3.660	0,56	2.611	0,61	2.266	0,43	3.504	0,54	3.984
2005	0,60	3.706	0,56	2.616	0,61	2.274	0,44	3.542	0,55	4.034

Tahun	16 Purwakarta IP	Anggaran	17 Karawang IP	Anggaran	18 Bekasi IP	Anggaran	19 Tangerang IP	Anggaran	20 Serang IP	Anggaran
1994	0,55	1.413	0,49	3.664	0,66	6.324	0,57	4.197	0,54	5.112
1995	0,56	1.060	0,49	3.043	0,64	6.597	0,57	3.952	0,54	5.680
1996	0,56	1.527	0,50	3.585	0,66	7.199	0,59	4.059	0,55	4.859
1997	0,57	1.529	0,51	4.335	0,68	6.207	0,58	3.629	0,57	4.147
1998	0,58	1.146	0,50	2.320	0,67	2.066	0,58	3.163	0,57	3.100
1999	0,59	1.537	0,51	3.665	0,67	6.420	0,58	3.919	0,57	5.036
2000	0,59	1.556	0,51	3.687	0,67	6.455	0,59	3.938	0,58	5.088
2001	0,60	1.575	0,51	3.709	0,68	6.490	0,59	3.957	0,58	5.141
2002	0,61	1.594	0,52	3.731	0,68	6.525	0,59	3.976	0,59	5.194
2003	0,62	1.614	0,52	3.753	0,69	6.561	0,59	3.995	0,60	5.248
2004	0,62	1.634	0,52	3.776	0,69	6.596	0,60	4.014	0,60	5.303
2005	0,63	1.654	0,53	3.798	0,69	6.632	0,60	4.033	0,61	5.358

Tahun	21 K. Bogor IP	Anggaran	22 K. Sukabumi IP	Anggaran	23 K. Bandung IP	Anggaran	24 K. Cirebon IP	Anggaran	25 K.Tangerang IP	Anggaran
1994	0,70	1.513	0,74	963	0,75	4.166	0,68	1.041	0,65	1.084
1995	0,70	1.053	0,74	798	0,76	4.187	0,68	955	0,65	2.665
1996	0,72	1.666	0,73	500	0,75	4.596	0,69	1.359	0,64	3.243
1997	0,72	2.246	0,75	501	0,76	5.470	0,69	1.247	0,65	2.471
1998	0,73	2.029	0,73	577	0,75	3.902	0,68	813	0,66	1.694
1999	0,74	1.893	0,73	731	0,75	4.624	0,69	1.173	0,66	2.700
2000	0,75	1.914	0,73	730	0,75	4.623	0,69	1.178	0,66	2.708
2001	0,76	1.935	0,73	728	0,75	4.622	0,69	1.182	0,66	2.715
2002	0,77	1.956	0,73	727	0,75	4.620	0,70	1.187	0,66	2.723
2003	0,77	1.978	0,73	726	0,75	4.619	0,70	1.192	0,67	2.730
2004	0,78	2.000	0,73	724	0,75	4.618	0,70	1.197	0,67	2.738
2005	0,79	2.020	0,72	723	0,75	4.617	0,70	1.201	0,67	2.746